

BAB I

P E N D A H U L U A N

Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2018 - 2023 Inspektorat kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2018-2023 Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Adapun hasil dari proses adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Inspektorat.

Perencanaan kinerja merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SOPD Tahun 2023 ini dibuat sebagai dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SOPD) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sehingga merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SOPD khususnya dan

pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja SOPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SOPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra SOPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja SOPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance* kondisi idealnya semua kegiatan organisasi pemerintahan seharusnya terukur, dapat memberikan arah yang jelas dan dapat dievaluasi, sehingga fungsi dan peran pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 adalah sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun serta mensinkronkan dan mensignifikan Rencana Kerja (Renja) SOPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.

Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2023 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber – sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2023 juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SOPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SOPD, proses penyusunan Renja SOPD, keterkaitan antara Renja SOPD dengan dokumen RKPD, Renstra SOPD, dengan Renja K/ L dan Renja provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,

kewenangan SOPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Inspektorat Tahun 2023

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Inspektorat Periode 2018-2023

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2021 dan perkiraan pencapaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Inspektorat.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Inspektorat.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Periode 2018-2023

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2021 terhadap pencapaian **Sasaran Strategis** dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023, serta progress pencapaian kinerja dalam RENSTRA Periode 2018-2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya.

Sasaran Strategis yang dievaluasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) Kabupaten Pulang Pisau yaitu :

1. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
2. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 pada umumnya realisasi program/ kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan, bahkan terdapat beberapa program/ kegiatan yang

pencapaian kinerjanya melebihi target rencana. Yaitu pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dalam Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2023 diperkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Pencapaian kinerja Tahun 2022 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2018-2023, dikarenakan Rencana Kerja 2022 masih dalam tahun berjalan, serta berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Periode 2018-2023.

Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Periode 2018-2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Inspektorat dan Pencapaian RENSTRA Inspektorat s/d Tahun 2021 Kabupaten Pulang Pisau

Sasaran Strategis	Indikator	TAHUN 2021			Ket.
		Target	Realisasi	(%)	
Meningkatnya hasil pengawasan yang akuntabel	A. Persentase tindak lanjut temuan BPK	88%	89,22%	101,39%	
	B. Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50 lap.	66 lap.	132,00%	
	C. Jumlah Pelaksanaan Reviu Kinerja	15 lap.	21 lap.	140,00%	
	D. Jumlah Pelaksanaan Reviu Keuangan.	6 lap.	42 lap.	700,00%	
Rata – rata				268,35%	Sangat baik

Pada tahun anggaran **2021**, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau didukung dana sebesar 7.514.962.245,32 dengan realisasi sebesar Rp. 6.679.658.787,00 (88,88%) yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai Rp. 3.660.257.876,32 realisasi sebesar Rp. 2.840.050.931,00 (77,59%)
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.410.608.644,00 realisasi sebesar Rp. 3.396.343.456,00 (99,58%)
- c. Belanja Hibah Rp. 9.746.825,00 realisasi Rp. 9.700.000,00 (99,52%)
- d. Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 136.449.900,00 realisasi sebesar Rp. 136.449.900,00 (100,00%)
- e. Belanja Bangunan dan Gedung Rp. 200.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 199.524.500,00 (99,76%)
- f. Belanja Irigasi dan Jaringan Rp. 97.899.000,00 realisasi sebesar Rp. 97.590.000,00 (99,68%)

2.2. Analisis kinerja pelayanan SOPD

Inspektorat sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK.

Oleh karena itu Inspektorat menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat lainnya yang berkaitan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan 10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, oleh karena itu obyek (sasaran utama) Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal melalui antara lain :

1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif) dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;
2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/ tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil;
5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SOPD

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus harus diketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Faktor Internal

- a. Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan berkala, adapun yang mempengaruhi masalah ini adalah kurangnya jangka waktu pemeriksaan dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk Inspektorat.
- b. Masih kurangnya jumlah Auditor yang dimiliki oleh Inspektorat, yaitu hanya sebanyak 9 orang dan Pejabat Pengawas Pemerintah sebanyak 7 orang.
- c. Masih terbatasnya kualitas SDM di bidang pengawasan dan luasnya obyek pengawasan sehingga berdampak pada kurang optimalnya kualitas pengawasan;

2. Faktor Eksternal

- a. Kualitas Auditor Inspektorat Daerah yang rata-rata masih ada pada level 2 (*Infrastructure*) seharusnya Auditor di Inspektorat Daerah sudah berada pada level 3 (*Integrated*) atau level 4 (*Managed*) atau 5 (*Optimized*), hal ini disebabkan karena masih terbatasnya penyertaan Auditor dalam pelaksanaan diklat teknis kepengawasan.

- b. Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih belum memenuhi Standar Pemeriksaan, hal ini disebabkan belum pernah dilaksanakannya Bimbingan Teknis tentang Penulisan LHP yang Efektif.
- c. Kurangnya wawasan pemahaman terhadap permasalahan dibidang pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat, sehingga untuk kedepan perlu keikutsertaan Auditor/ P2UPD dalam keanggotaan AAIP dan peningkatan koordinasi baik dengan Aparat pengawas Eksternal maupun dengan Aparat Penegak Hukum.

Setelah diketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan Inspektorat sebagai *Counsultant Partner*.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Bupati Pulang Pisau serta Visi dan Misi Inspektorat khususnya.

2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD

RENJA Tahun 2023 disusun diselaraskan dengan RKPD Tahun 2023 dan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau periode 2018-2023.

2.5. Penelaahan usulan program dan Kegiatan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya; kecuali hanya penanganan kasus pengaduan dan pemberian jasa konsultasi, dengan tujuan utama pada meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern. Pemerintahan (**APIP**).

Program yang dilaksanakan tetap mengacu pada prioritas yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 disusun dengan mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari seluruh Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Inspektur Pembantu Khusus kemudian dilakukan penyelarasan pada sekretariat untuk seterusnya disusun menjadi Rencana Kerja Inspektorat.

Usulan program dan kegiatan dari sekretaris yang mengakomodir seluruh kepentingan Inspektur Pembantu kemudian disusun menjadi program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.

Program dan kegiatan Inspektorat yang ditetapkan dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri dari RPJP Nasional 20 Tahunan, RPJM Nasional 5 Tahunan dan Renja Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Pulang Pisau. RPJMD Kabupaten Pulang Pisau merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra SOPD dan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahunan.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja,

pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2023, sedangkan dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SOPD yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan visi dan misi.

Adapun **Tujuan** Rencana Kerja sesuai dengan tujuan pada Renstra yang telah dibuat Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja organisasi melalui pembenahan administrasi perkantoran dan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM Aparat Pengawas.
3. Meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, visioner dan bebas KKN.

Sedangkan **Sasaran** Rencana Kerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan Sasaran pada Renstra adalah :

"Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan"

3.3. Program dan Kegiatan

Berpedoman pada Program dan Kegiatan prioritas pada Renstra yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tersebut, maka Tahun 2023 Rencana Program dan Prioritas kinerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Pengawasan Desa
- Kerjasama Pengawasan Internal
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

b. Pendampingan dan Asistensi

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta Besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2022.

RUMUSAN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023

					Urusan/ Bidang Urusan/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2023				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
							Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
								Volume	Satuan	Rp	
1						2	3		4	5	6
						Inspektorat					
6	01	1				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90,00	Persen	5.814.630.178	
6	01	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90,00	Persen	91.886.000	
6	01	1	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dokumen	31.920.000	
6	01	1	2.01	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	1	Paket	2.351.600	
6	01	1	2.01	01	02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	Paket	884.800	
6	01	1	2.01	01	03	Belanja Lembur	Belanja Lembur yang dilaksanakan	1	Tahun	6.000.000	
6	01	1	2.01	01	04	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dilaksanakan	1	Tahun	22.683.600	
6	01	1	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	19.966.000	
6	01	1	2.01	02	01	Belanja Lembur	Belanja Lembur yang dilaksanakan	1	Tahun	4.000.000	
6	01	1	2.01	02	02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dilaksanakan	1	Tahun	15.966.000	
6	01	1	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	10.000.000	
6	01	1	2.01	03	01	Belanja Lembur	Belanja Lembur yang dilaksanakan	1	Tahun	4.000.000	
6	01	1	2.01	03	02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dilaksanakan	1	Tahun	6.000.000	
6	01	1	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	10.000.000	
6	01	1	2.01	04	01	Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	1	Paket	3.304.100	
6	01	1	2.01	04	02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	Paket	936.400	
6	01	1	2.01	04	03	Belanja Lembur	Belanja Lembur yang dilaksanakan	1	Tahun	5.759.500	

					Urusan/ Bidang Urusan/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Rencana Kerja Tahun 2023			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
									Volume	Satuan		Rp
1					2			3		4	5	6
6	01	1	2.01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	10.000.000	
6	01	1	2.01	05	01		Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	1	Paket	3.304.100	
6	01	1	2.01	05	02		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	Paket	936.400	
6	01	1	2.01	05	03		Belanja Lembur	Belanja Lembur yang dilaksanakan	1	Tahun	5.759.500	
6	01	1	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	dokumen	10.000.000	
6	01	1	2.01	07	01		Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	1	Paket	3.304.100	
6	01	1	2.01	07	02		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	Paket	936.400	
6	01	1	2.01	07	03		Belanja Lembur	Belanja Lembur yang dilaksanakan	1	Tahun	5.759.500	
6	01	1	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90,00	Persen	2.384.742.820	
6	01	1	2.02	1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	28	Orang	2.348.502.290	
6	01	1	2.02	1	01		Belanja Gaji Pokok PNS	Belanja Gaji Pokok PNS yang dibutuhkan	1	Tahun	1.054.195.310	
6	01	1	2.02	1	02		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Belanja Tunjangan Keluarga PNS yang dibutuhkan	1	Tahun	118.998.845	
6	01	1	2.02	1	03		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Belanja Tunjangan Jabatan PNS yang dibutuhkan	1	Tahun	122.582.250	
6	01	1	2.02	1	04		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Belanja Tunjangan Fungsional PNS yang dibutuhkan	1	Tahun	61.705.000	
6	01	1	2.02	1	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS yang dibutuhkan	1	Tahun	16.705.500	
6	01	1	2.02	1	06		Belanja Tunjangan Beras PNS	Belanja Tunjangan Beras PNS yang dibutuhkan	1	Tahun	70.844.865	
6	01	1	2.02	1	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS yang dibutuhkan	1	Tahun	6.049.361	
6	01	1	2.02	1	08		Belanja Pembulatan Gaji PNS	Belanja Pembulatan Gaji PNS yang dibutuhkan	1	Tahun	13.981	
6	01	1	2.02	1	09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS yang dibutuhkan	1	Tahun	54.967.521	
6	01	1	2.02	1	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS yang dibutuhkan	1	Tahun	2.530.056	
6	01	1	2.02	1	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS yang dibutuhkan	1	Tahun	7.590.212	
6	01	1	2.02	1	12		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS yang dibutuhkan	1	Tahun	832.319.389	
									1			

					Urusan/ Bidang Urusan/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2023				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
							Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
								Volume	Satuan	Rp		
1					2		3			4	5	6
6	01	1	2.02	5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	18.000.030	
6	01	1	2.02	5	01		Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	1	Paket	3.103.630	
6	01	1	2.02	5	02		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	Paket	896.400	
6	01	1	2.02	5	03		Belanja Lembur	Belanja Lembur yang dibutuhkan	1	Tahun	14.000.000	
									1			
6	01	1	2.02	7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	18.240.500	
6	01	1	2.02	7	01		Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	1	Paket	3.304.100	
6	01	1	2.02	7	02		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	Paket	936.400	
6	01	1	2.02	7	03		Belanja Lembur	Belanja Lembur yang dibutuhkan	1	Tahun	14.000.000	
6	01	1	2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90,00	Persen	10.000.000	
6	01	1	2.03	5			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Dokumen	10.000.000	
6	01	1	2.03	5	01		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Biasa yang dibutuhkan	1	Tahun	10.000.000	
6	01											
6	01	1	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90,00	Persen	744.184.400	
6	01	1	2.05	1			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Tahun	10.000.000	
6	01	1	2.05	1	01		Belanja ID Card	Jumlah ID Card	1	Paket	10.000.000	
6	01	1	2.05	2			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28	Orang	66.802.400	
6	01	1	2.05	2	01		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	1	Paket	33.401.200	
6	01	1	2.05	2	02		Belanja Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu	1	Paket	33.401.200	

					Urusan/ Bidang Urusan/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2023			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
							Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
								Volume	Satuan		Rp
1						2		3	4	5	6
									1		
6	01	1	2.05	3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Laporan	10.000.000
6	01	1	2.05	3	01		Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1	Paket	5.000.000
6	01	1	2.05	3	02		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	Paket	5.000.000
6	01	1	2.05	9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Tahun	335.490.000
6	01	1	2.05	9	01		Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	Jumlah Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1	Tahun	210.000.000
6	01	1	2.05	9	02		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	125.490.000
6	01	1	2.05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Tahun	24.812.000
6	01	1	2.05	10	01		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	24.812.000
6	01	1	2.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28	Orang	297.080.000
6	01	1	2.05	11	01		Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	Jumlah Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1	Tahun	140.000.000
6	01	1	2.05	11	02		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	157.080.000
6	01	1	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	90,00	Persen	859.747.080
6	01	1	2.06	1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Tahun	43.435.700
6	01	1	2.06	1	01		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1	Paket	43.435.700
6	01	1	2.06	2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Tahun	33.208.480
6	01	1	2.06	2	01		Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Jumlah Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1	Paket	30.298.880
6	01	1	2.06	2	02		Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Jumlah Modal Alat Kedokteran Umum	1	Paket	2.909.600
6	01	1	2.06	2	03		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Belanja yang dibutuhkan			
6	01	1	2.06	3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	Tahun	41.925.500
6	01	1	2.06	3	01		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1	Paket	41.925.500

					Urusan/ Bidang Urusan/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Rencana Kerja Tahun 2023			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
									Volume	Satuan		Rp		
1					2			3			4	5	6	
6	01	1	2.06	4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	Tahun	127.908.300			
6	01	1	2.06	4	01		Belanja Natura dan Pakan-Natura	Jumlah Natura dan Pakan-Natura	1	Tahun	57.866.700			
6	01	1	2.06	4	02		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	64.800.000			
6	01	1	2.06	4	03		Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu	1	Tahun	5.241.600			
6	01	1	2.06	5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Tahun	49.996.000			
6	01	1	2.06	5	01		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	Paket	49.996.000			
6	01	1	2.06	6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Tahun	36.000.000			
6	01	1	2.06	6	01		Belanja Surat Kabar/Majalah	Jumlah Surat Kabar/Majalah	1	Tahun	36.000.000			
6	01	1	2.06	7			Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	1	Tahun	148.693.100			
6	01	1	2.06	7	01		Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	1	Paket	145.783.100			
6	01	1	2.06	7	02		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1	Paket	2.910.000			
6	01	1	2.06	9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Tahun	350.000.000			
6	01	1	2.06	9	01		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	350.000.000			
									1					
6	01	1	2.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	28.580.000			
6	01	1	2.06	11	01		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	2.750.000			
6	01	1	2.06	11	01		Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	Jumlah Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	1	Tahun	21.600.000			
6	01	1	2.06	11	01		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	4.230.000			
6	01	1	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00	Persen	761.972.993			
6	01	1	2.07	1			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Unit	50.000.000			
6	01	1	2.07	1	01		Belanja Kendaraan Dinas Roda 2	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	2	Unit	50.000.000			

					Urusan/ Bidang Urusan/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Rencana Kerja Tahun 2023			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
									Volume		Satuan	Rp	
1					2			3			4	5	6
6	01	1	2.07	2			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	476.972.993		
6	01	1	2.07	2	01		Belanja Kendaraan Operasional Roda 4	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4	1	Unit	476.972.993		
6	01	1	2.07	5			Pengadaan Mebebelur	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Paket	35.000.000		
6	01	1	2.07	5	01		Belanja Modal Mebel	Jumlah Mebel	1	Paket	35.000.000		
6	01	1	2.07	5	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Jumlah Belanja Alat Rumah Tangga					
6	01	1	2.07	5	03		Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Jumlah Belanja Meja Kerja dan Unit lainnya					
6	01	1	2.07	6			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Paket	150.000.000		
6	01	1	2.07	6	01		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Jumlah Komputer Unit Lainnya	1	Paket	150.000.000		
6	01	1	2.07	6	02		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya						
6	01	1	2.07	9			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	20.000.000		
6	01	1	2.07	9	01		Belanja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Belanja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	20.000.000		
6	01	1	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	15.000.000		
6	01	1	2.07	10	01		Belanja Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Belanja Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	15.000.000		
6	01	1	2.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	15.000.000		
6	01	1	2.07	11	01		Belanja Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Belanja Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	15.000.000		
6	01	1	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,00	Persen	383.521.885		
6	01	1	2.08	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Tahun	15.544.050		
6	01	1	2.08	1	01		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1	Tahun	15.544.050		

					Urusan/ Bidang Urusan/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Rencana Kerja Tahun 2023			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
									Volume	Satuan		Rp	
1					2			3			4	5	6
6	01	1	2.08	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Tahun	91.977.835		
6	01	1	2.08	2	01		Belanja Air	Jumlah Belanja Air	1	Tahun	1.800.000		
6	01	1	2.08	2	02		Belanja Listrik	Jumlah Belanja Listrik	1	Tahun	46.807.795		
6	01	1	2.08	2	03		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	Jumlah Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	1	Tahun	43.370.040		
6	01	1	2.08	4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Tahun	276.000.000		
6	01	1	2.08	4	01		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jumlah Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1	Tahun	276.000.000		
6	01	1	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,00	Persen	578.575.000		
6	01	1	2.09	1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Tahun	200.000.000		
6	01	1	2.09	1	01		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Jumlah Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1	Tahun	5.000.000		
6	01	1	2.09	1	02		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1	Tahun	195.000.000		
6	01	1	2.09	2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Tahun	20.000.000		
6	01	1	2.09	2	01		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Jumlah Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1	Tahun	5.000.000		
6	01	1	2.09	2	02		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Penumpang	Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1	Tahun	15.000.000		
6	01	1	2.09	6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Tahun	158.575.000		
6	01	1	2.09	6	01		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1	Tahun	41.600.000		
6	01	1	2.09	6	02		Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Pendingin	Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Pendingin	1	Tahun	35.620.000		
6	01	1	2.09	6	03		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Jumlah Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1	Tahun	42.375.000		

						Urusan/ Bidang Urusan/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2023			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Volume	Satuan	Rp	
1						2		3			4	5	6
6	01	1	2.09	6	04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan		Jumlah Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan			1	Tahun	38.980.000
6	01	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1	Tahun	200.000.000
6	01	1	2.09	9	01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			1	Tahun	200.000.000
6	01	2				Program Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan			88,50	Persen	2.096.135.000
6	01	2	2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan Internal			88,50	Persen	1.600.000.000
6	01	2	2.01	1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			2	Laporan	250.000.000
6	01	2	2.01	1	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1	Tahun	250.000.000
6	01	2	2.01	2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			10	Laporan	250.000.000
6	01	2	2.01	2	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1	Tahun	250.000.000
6	01	2	2.01	3		Reviu Laporan Kinerja		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja			1	Laporan	100.000.000
6	01	2	2.01	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1	Tahun	100.000.000
6	01	2	2.01	4		Reviu Laporan Keuangan		Terlaksannya Reviu Laporan Keuangan			5	Laporan	425.000.000
6	01	2	2.01	4	01	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa		Jumlah Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa			1	Tahun	28.800.000
6	01	2	2.01	4	02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1	Tahun	396.200.000
6	01	2	2.01	5		Pengawasan Desa		Terlaksannya Pengawasan Desa			9	Laporan	200.000.000
6	01	2	2.01	5	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1	Tahun	200.000.000
6	01	2	2.01	6		Kerjasama Pengawasan Internal		Terlaksannya Kerjasama Pengawasan Internal			1	Laporan	150.000.000
6	01	2	2.01	6	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1	Paket	4.993.100

						Urusan/ Bidang Urusan/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
							Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
								Volume		Satuan	Rp
1						2	3		4	5	6
6	01	2	2.01	6	02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1	Paket	3.980.900	
6	01	2	2.01	6	03	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	5.500.000	
6	01	2	2.01	6	04	Belanja Air	Jumlah Belanja Air	1	Tahun	2.000.000	
6	01	2	2.01	6	05	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	Jumlah Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	1	Tahun	7.234.175	
6	01	2	2.01	6	06	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	Jumlah Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	1	Tahun	2.000.000	
6	01	2	2.01	6	07	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	124.291.825	
6	01	2	2.01	7		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksannya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	Laporan	225.000.000	
6	01	2	2.01	7	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	225.000.000	
6	01	2	2.02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	88,50%	Persen	496.135.000	
6	01	2	2.02	1		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2	Laporan	36.135.000	
6	01	2	2.02	1	01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	5.500.000	
6	01	2	2.02	1	02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	30.635.000	
6	01	2	2.02	2		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksannya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Laporan	460.000.000	
6	01	2	2.02	2	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	460.000.000	
6	01	3				Program Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Program Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	90,00	Persen	65.000.000	
6	01	3	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Capaian Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	90,00	Persen	10.000.000	
6	01	3	2.01	1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1	Dokumen	10.000.000	
6	01	3	2.01	1	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	10.000.000	
6	01	3	2.02			Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Pendampingan dan Asistensi	90,00	Persen	55.000.000	
6	01	3	2.02	1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	10.000.000	

					Urusan/ Bidang Urusan/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Rencana Kerja Tahun 2023			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
									Volume	Satuan		Rp
1						2		3		4	5	6
6	01	3	2.02	1	01		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1	Tahun	10.000.000
6	01	3	2.02	2			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksannya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		1	Laporan	25.000.000
6	01	3	2.02	2	01		Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	Jumlah Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa		1	Tahun	6.000.000
6	01	3	2.02	2	02		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	Tahun	19.000.000
6	01	3	2.02	3			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksannya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		1	Laporan	10.000.000
6	01	3	2.02	3	01		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	Tahun	5.000.000
6	01	3	2.02	3	02		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	Tahun	5.000.000
6	01	3	2.02	4			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksannya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		1	Laporan	10.000.000
6	01	3	2.02	4	01		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	Tahun	10.000.000
6	01	3	2.02	4	02		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
JUMLAH ANGGARAN PER TAHUN												7.975.765.178

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2018-2023, dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pengawasan pada tahun 2023. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya.

Pulang Pisau, Juli 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN PULANG PISAU**

SAPRI JUNJUNG, SE, MA 

Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199203 1 016



RENCANA KERJA

INSPEKTORAT

KABUPATEN PULANG PISAU



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN 2023